

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 2, Tahun 2020

ISSN 0853-9316

- **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
oleh: Satria Rangga Putra
- **BUILDING SYNERGY BETWEEN INDONESIA'S TRADITIONAL AND MODERN RETAIL INDUSTRIES WITH E-COMMERCE**
oleh: Edmira Rivani, Eka Budiyantri, dan Sony Hendra Permana
- **LOCAL STRONGMAN DI BANGKALAN: KUASA POLITIK "BLATER" DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018**
oleh: Moh. Zainor Ridho
- **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALDI PROVINSI JAWA BARAT**
oleh: Venti Eka Satya
- **DAMPAK PANDEMI WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID) 19 DAN LOCKDOWN TERHADAP KESEHATAN MENTAL: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI DAN AGAMA**
oleh: Lukman Nul Hakim



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 2, Tahun 2020

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH <i>oleh: Satria Rangga Putra</i>	91-107
● <i>BUILDING SYNERGY BETWEEN INDONESIA'S TRADITIONAL AND MODERN RETAIL INDUSTRIES WITH E-COMMERCE</i> <i>oleh: Edmira Rivani, Eka Budiyananti, dan Sony Hendra Permana</i>	109-121
● <i>LOCAL STRONGMAN</i> DI BANGKALAN: KUASA POLITIK “BLATER” DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018 <i>oleh: Moh. Zainor Ridho</i>	123-143
● PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALDI PROVINSI JAWA BARAT <i>oleh: Venti Eka Satya</i>	145-160
● DAMPAK PANDEMI WABAH <i>CORONAVIRUS DISEASE</i> (COVID) 19 DAN <i>LOCKDOWN</i> TERHADAP KESEHATAN MENTAL: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI DAN AGAMA <i>oleh: Lukman Nul Hakim</i>	161-177

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 25. No. 2 Tahun 2020. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan baik dari penulis internal Pusat Penelitian maupun penulis eksternal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", yang ditulis oleh Satria Rangga Putra dari Universitas Negeri Surabaya. Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. Penulis mengajukan gagasan perubahan konsep hak subpoena dari sebelumnya menggunakan bantuan Kepolisian, menjadi pemanggilan terakhir bersifat memaksa melalui surat resmi DPRD. Tidak dapat dipenuhinya pemanggilan terakhir tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of parliament*. Desain tersebut menghendaki "kriminalisasi" tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai *contempt of parliament*.

Artikel kedua adalah tentang "*Building Synergy Between Indonesia's Traditional and Modern Retail Industries With E-Commerce*", yang ditulis oleh Edmira Rivani, Eka Budiyaniti, dan Sony Hendra Permana dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Artikel berbahasa Inggris ini menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai pasar yang sangat potensial dalam industri retail. Penulis mengungkapkan bahwa retail tradisional membutuhkan suatu sistem atau teknologi yang berperan untuk mengumpulkan barang dari pengecer tradisional, melakukan perencanaan logistik, menjamin standarisasi barang, ketepatan waktu pengiriman, dan pengendalian kualitas. Pelaku bisnis retail modern di dorong untuk mengubah strateginya dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan melibatkan elemen-elemen wisata kasual atau liburan di setiap produknya untuk membangun sinergi. Pengusaha retail modern juga dapat meningkatkan produk tradisional ke tingkat nasional dengan membantu mereka memenuhi standar sehingga mereka dapat dijual di pengecer modern, bekerjasama dengan UKM untuk memasuki distribusi rantai retail modern perdagangan berbasis *e-commerce*. Tulisan ketiga membahas isu politik lokal dengan judul "*Local Strongman di Bangkalan: Kuasa Politik "Blater" Dalam Demokrasi Lokal 2008-2018*", yang ditulis oleh Moh. Zainor Ridho dari UINSMH Banten. Artikel ini menyatakan bahwa desentralisasi telah memicu lahirnya fenomena "orang kuat lokal" di berbagai daerah, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jambi, dan Bangkalan. Dalam sebuah kontestasi politik lokal, fenomena keberadaan "orang kuat lokal" membentuk segitiga akomodasi antara birokrat, politisi dan elit non formal. Segitiga akomodatif tersebut, menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik dari arena politik lokal. Secara kultural, "orang kuat lokal" memanfaatkan agen-agen kekerasan yang dibentuk bersama jaringan-jaringannya. Maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Mengapa blater terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana kuasa politik blater pada kontestasi politik lokal di Bangkalan? Kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang *Blatèr* dapat buktikan ketika Fuad Amin (*Blatèr*) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti keduanya yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (*Blatèr*) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2012. "orang kuat lokal" memanfaatkan *linkage family* baik hubungan darah, keturunan dan hubungan kerabat.

Tulisan keempat ditulis oleh Venti Eka Satya dengan judul "Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Provinsi Jawa Barat". Reformasi keuangan negara

mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), serta penerapan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Temuan utama studi ini yakni bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin, regulasi, teknologi informasi dan SDM. Keempat faktor penentu tersebut terbukti sangat berpengaruh dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. Namun dari keempat faktor tersebut, komitmen pimpinan merupakan faktor penentu. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten terutama di bidang akuntansi. Selain itu, belum terintegrasinya sistem aplikasi yang digunakan juga menjadi kendala tersendiri.

Tulisan yang terakhir berjudul “Dampak Pandemi Wabah *Coronavirus Disease (Covid) 19* Dan Lockdown Terhadap Kesehatan Mental: Sebuah Kajian Psikologi dan Agama”, yang ditulis oleh Lukman Nul Hakim dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pandemi COVID-19 tidak semata menyerang kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Pandemi COVID-19 dan kebijakan *lockdown* telah membuat masyarakat mengalami stres, cemas dan melakukan tindakan diluar ambang batas kewajaran seperti membunuh anak sendiri, bunuh diri dan lain-lain. Kajian literatur menunjukkan adanya kontribusi positif dari pendekatan psikologis dan agama bagi kesehatan fisik maupun mental. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi intervensi medis. Tulisan ini mengusulkan pendekatan penanganan pandemi *Coronavirus Disease (COVID) 19* yang bersifat integral-holistik antara kesehatan fisik dan mental.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 25, No. 2 Tahun 2020. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.Si, Prof. Dr. Lili Romli, M. Si, Prof. Dr. Achmad Suryana dan Dr. Juneman Abraham, S.Psi, M.Si, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, September 2020

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Satria Rangga Putra (Universitas Negeri Surabaya)

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, hlm. 91-107

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. Tulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal dan perbandingan hukum, mencoba menganalisis implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak subpoena DPRD serta bagaimana mendesain ulang hak tersebut. Penulis mengajukan gagasan perubahan konsep hak subpoena dari sebelumnya menggunakan bantuan Kepolisian, menjadi pemanggilan terakhir bersifat memaksa melalui surat resmi DPRD. Tidak dapat dipenuhinya pemanggilan terakhir tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of parliament*. Desain tersebut menghendaki “kriminalisasi” tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai *contempt of parliament*.

Kata kunci: hak subpoena; DPRD; *contempt of parliament*.

Edmira Rivani, Eka Budiyanti, dan Sony Hendra Permana (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

MEMBANGUN SINERGI ANTARA INDUSTRI RETAIL TRADISIONAL DAN MODERN DENGAN *E-COMMERCE*

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, hlm. 109-121

Indonesia mempunyai pasar yang sangat potensial dalam industri retail. Laporan hasil survei perusahaan konsultan global A.T. Kearney dalam *Global Retail Development Index* tahun 2016, juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat urutan 5 dari 30 negara berkembang perihal sektor bisnis retail paling potensial di dunia. Pertumbuhan industri retail tersebut tidak berlanjut di tahun 2017. Fenomena-fenomena tersebut dikhawatirkan merupakan ancaman akan masuknya pendatang baru dan produk substitusi (seperti perdagangan elektronik/*e-commerce*), mengharuskan pelaku retail untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produknya tetap diminati konsumen sehingga penjualan produk mereka terus meningkat. Analisis ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa retail tradisional membutuhkan suatu sistem atau teknologi yang berperan untuk mengumpulkan barang dari pengecer tradisional, melakukan perencanaan logistik, menjamin standarisasi barang, ketepatan waktu pengiriman, dan pengendalian kualitas. Sementara itu, pelaku bisnis retail *modern* di dorong untuk mengubah strateginya dalam menghadapi persaingan ekonomi. Melibatkan elemen wisata kasual atau liburan di setiap produknya adalah salah satu strategi untuk membangun sinergi, yang merupakan cerminan dari perubahan terbaru dalam pola konsumsi publik. Pengusaha retail *modern* tersebut juga dapat meningkatkan produk tradisional ke tingkat nasional dengan membantu mereka memenuhi standar sehingga mereka dapat dijual di pengecer *modern*, bekerja sama dengan UKM untuk memasuki distribusi rantai retail *modern* perdagangan berbasis *e-commerce*.

Kata kunci: retail tradisional; retail modern; *e-commerce*.

**LOCAL STRONGMAN DI BANGKALAN:
KUASA POLITIK “BLATER” DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018**

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, hlm. 123-142

Desentralisasi telah memicu lahirnya fenomena “orang kuat lokal” di berbagai daerah, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jambi, dan Bangkalan. Dalam sebuah kontestasi politik lokal, fenomena keberadaan “orang kuat lokal” membentuk segitiga akomodasi antara birokrat, politisi dan elit non-formal. Segitiga akomodatif tersebut, menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik dari arena politik lokal. Desentralisasi atau demokrasi lokal, secara substansial telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar di ranah politik lokal. Secara kultural, “orang kuat lokal” memanfaatkan agen-agen kekerasan yang dibentuk bersama jaringan-jaringannya. Maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Mengapa *blatèr* terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana kuasa politik *blatèr* pada kontestasi politik lokal di Bangkalan? Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. *Blatèr* sebagai bos lokal memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan pergantian kepemimpinan politik lokal di daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menciptakan bos lokal baru atau orang kuat lokal seperti, *blatèr* untuk menguasai penguasaan politik di daerah. Ketiga, kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang *blatèr* dapat buktikan ketika Fuad Amin (*blatèr*) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti kedua yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (*blatèr*) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2012. “orang kuat lokal” memanfaatkan *linkage family* baik hubungan darah, keturunan dan hubungan kerabat. Terdapat berbagai unsur kekuatan yang dimiliki oleh “orang kuat lokal” (*blatèr*) yaitu kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Kata kunci: orang kuat lokal; *blatèr*; demokrasi lokal.

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, hlm. 143-158

Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), serta penerapan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu tolok ukur penerapan sistem akuntansi yang baik adalah opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rentang waktu enam tahun (2011-2016), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini yang diperoleh tersebut provinsi Jawa Barat tentunya telah memiliki sistem dan sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansinya dilihat dari perspektif Komitmen Pimpinan, Regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi. Selain itu juga, bermaksud mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemprov Jawa Barat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada instansinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan utama studi ini yakni bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin, regulasi, teknologi informasi dan SDM. Keempat faktor penentu tersebut terbukti sangat berpengaruh dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. Namun dari keempat faktor tersebut, komitmen pimpinan merupakan faktor penentu. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten terutama di bidang akuntansi. Selain itu, belum terintegrasinya sistem aplikasi yang digunakan juga menjadi kendala tersendiri.

Kata kunci: sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual; basis akuntansi; laporan keuangan; sistem akuntansi keuangan daerah.

Lukman Nul Hakim (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**DAMPAK PANDEMI WABAH *CORONAVIRUS DISEASE (COVID) 19*
DAN *LOCKDOWN* TERHADAP KESEHATAN MENTAL:
KAJIAN PSIKOLOGI DAN AGAMA**

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, hlm. 159-176

Pandemi COVID-19 tidak semata menyerang kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Pandemi COVID-19 dan kebijakan *lockdown* telah membuat masyarakat mengalami stres, cemas dan melakukan tindakan diluar ambang batas kewajaran seperti membunuh anak sendiri, bunuh diri dan lain-lain. Pada artikel ini penulis mencoba menjawab pertanyaan, bagaimanakah efek psikologis kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi wabah coronavirus disease (covid) 19 di indonesia? Tulisan ini menggunakan metode riset kepustakaan dimana penulis melakukan penelaahan terhadap jurnal, buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kajian literatur menunjukkan adanya kontribusi positif dari pendekatan psikologis dan agama bagi kesehatan fisik maupun mental. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi intervensi medis. Tulisan ini mengusulkan pendekatan penanganan pandemi *Coronavirus Disease (COVID) 19* yang bersifat integral-holistik antara kesehatan fisik dan mental.

Kata kunci: agama, covid-19, pandemi, psikologi, kesehatan mental .

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Satria Rangga Putra (Universitas Negeri Surabaya)

LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 16/PUU-XVII/2018 ON LOCAL LEGISLATIVE ASSEMBLY'S SUBPOENA RIGHT

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, p. 91-107

Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVII/2018 raised legal implications for DPRD subpoena rights. Subpoena right authorized DPRD to force local government officials, corporations, and citizens to comply and give testify also produce documents. This paper used doctrinal and legal comparison approach, trying to analyze legal implications of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVII/2018 on DPRD subpoena rights and how to redesign these right. The author proposes an idea to change concept of subpoena right from previously used police assistance, become forceful final summons through official letter from DPRD. Failure to fulfill this last summons can be categorized as contempt of parliament. The design requires "criminalization" of refusing to give testify and produce documents also refusing to comply DPRD subpoena rights (inquiry right context) without a valid reasons as contempt of parliament.

Keywords: subpoena right; DPRD; contempt of parliament.

Edmira Rivani, Eka Budiyanti, dan Sony Hendra Permana (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

BUILDING SYNERGY BETWEEN INDONESIA'S TRADITIONAL AND MODERN RETAIL INDUSTRIES WITH E-COMMERCE

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, p. 109-121

Indonesia has a very potential market in the retail industry, proven by its position in 5th rank out of 30 developing countries regarding the business sector retail most potential in the world. Meanwhile, the growth of retail industry does not continue in 2017. These phenomena are possibly due to the entry of new entrants and substitute products, requiring retailers to use the right marketing strategy. This paper aims to describe how to build synergy strategy between traditional and modern retail industry with e-commerce. This paper is descriptive by using a qualitative approach. The results of the study reveal that traditional retail need a system or technology which role was to collect goods from traditional retailers, carry out logistics planning, ensure standardization of goods, punctuality of delivery, and quality control. Meanwhile, modern retail businesses are encouraged to change their strategies to face economic competition. Involving elements of casual tourism or leisure in each of its products is one of the strategies to build synergy, which is a reflection of the recent changes in public consumption patterns. Those modern retailers also can further elevate traditional products to the national level by helping them meet the standards so that they can be sold in modern retailers, cooperating with SMEs to enter the modern retail chain distribution e-commerce-based trading.

Keywords: *traditional retail, modern retail, e-commerce.*

**LOCAL STRONGMAN IN BANGKALAN:
THE POWER OF BLATER IN LOCAL DEMOCRACY 2008-2018**

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, p. 123-142

Decentralization has triggered the emergence of the phenomenon of “local strongmen” in various regions, such as Banten, West Nusa Tenggara, Sulawesi, Jambi and Bangkalan. In a local political contestation, the phenomenon of the “local strongmen” forms an accommodation triangle between bureaucrats, politicians and non-formal elites. The accommodative triangle implements government policies to gain political legitimacy from the local political arena. Decentralization or local democracy has substantially produced “local strongmen” who have a very big role and influence in the realm of local politics. Culturally, “local strongmen” make use of the agents of violence that are formed together with their networks. This study will answer several research questions, namely; Why was Blater involved in local political contestation in Bangkalan Regency? and What about blater’s political power in local political contestation in Bangkalan? The method used is qualitative method. Qualitative method is the method to explore and understand the text and context from social contexts or human contexts. Blatèr as the local boss has enormous power to determine the replacement of local political leadership in the regional head elections directly. Second, direct regional head elections have created new local bosses or local strongmen such as blatèr to control political control in the regions. Third, the strong influence of local political control by a blatèr can prove when Fuad Amin (blatèr) was elected as a Member of the DPR RI FPKB for the 1999-2004 period. The second evidence is that in 2003, Fuad Amin (blatèr) was elected as Regent of Bangkalan for the 2003-2008 and 2008-2012 periods. And the last evidence is that in 2019 election, Fuad Amin (blatèr) elected as Chief of Regional Representative Council in Bangkalan. “local strongmen” take advantage of the linkage family both blood relations, descent and kinship relationship. The involvement of “local strongmen” in the elections for the Regent and Deputy Regent of Bangkalan is interesting to research and prove. The dynamics of political election for the Regent and Deputy Regent in Bangkalan, there were various elements of strength possessed by “local strongmen” (blatèr), namely political, social, cultural and economic power.

Keywords: local strongmen; blater; local democracy.

Venti Eka Satya (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASE GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM IN WEST JAVA PROVINCE

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, p. 143-158

Government financial reforms mandate the importance of good financial governance and the adoption of international best practices for Indonesia condition. Governance financial reforms include reforms in accounting and government financial reporting. One of the benchmarks for implementing a good accounting system is BPK's audit opinion. In five years (2011-2015), the West Java provincial government successively obtained an unqualified opinion. Based on the opinion, Province of West Java certainly has a system and resources that are sufficient to carry out accounting procedures in accordance with applicable laws and standards and regulations. This study aims to find out how the Province of West Java applies accrual-based accounting system to its institution viewed from the perspective of the Leadership Commitment, Regulation, Human Resources, and Information Technology. It also intends to know the obstacles and problems faced by the West Java Provincial Government in applying accrual-based accounting to their institutions. This research uses descriptive qualitative method using empirical data collected through observation, interviews and documentation. The main thing that influences the implementation of the accrual-based accounting system is the commitment of leaders, regulations, information technology and human resources. The four determinants are proven to be very influential in the implementation of accrual-based accounting systems in the government. The main thing that is decisive is the leadership commitment. The problem faced in implementing this system is the lack of quality and quantity of competent human resources, especially in the field of accounting. The application system that has not been integrated is also an problem.

Keywords: *accrual base government accounting system; accounting base; financial statement; regional accounting financial system.*

Lukman Nul Hakim (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

***THE IMPACT OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID) 19
AND LOCKDOWN POLICY ON MENTAL HEALTH:
STUDY OF PSYCHOLOGY AND RELIGION***

Kajian Vol. 25, No. 2, Tahun 2020, p. 159-176

The COVID-19 pandemic does not only attack physical health, but also mental health. The COVID-19 pandemic and the lockdown policy have made people feel stressed, anxious and take actions beyond reasonable limits, such as killing their own children, suicide and others. In this article, the author tries to answer the question, what is the psychological effect of large-scale social restriction policies in handling the coronavirus disease (covid) 19 pandemic in Indonesia? This paper uses a library research method in which the authors conduct a review of journals, books, literature, notes and various reports related to research problems. The literature review shows the positive contribution of psychological and religious approaches to physical and mental health. These steps need to be taken to complement the medical intervention. This paper proposes an integral-holistic approach to handling the pandemic Coronavirus Disease (COVID) 19 between physical and mental health.

Keywords: covid-19, mental health, pandemic, psychology, religion.